

Menyurat Takdir Pernikahan: Transendentalisasi, Institusionalisasi, dan Normalisasi

Judith Chanutomo

*Program Magister Kajian Budaya, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Indonesia
e-mail: judithchanutomo95@gmail.com*

Abstrak

Pernikahan dalam banyak masyarakat, termasuk Indonesia, kerap dipandang sebagai jenjang hidup yang alami dan tak terhindarkan. Ia hadir sebagai semacam “takdir sosial” yang jarang dipertanyakan. Artikel ini memandang keniscayaan tersebut bukan sebagai fakta kodrati, melainkan sebagai efek dari operasi wacana dan relasi kuasa. Dengan menggunakan kerangka teori wacana Foucauldian dan pendekatan genealogis, penelitian ini menelusuri mekanisme diskursif yang memproduksi pernikahan sebagai sesuatu yang tampak alami, wajar, dan final. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan empat informan kelas menengah, terdiri atas dua laki-laki dan dua perempuan yang pernah menikah dan kemudian bercerai. Narasi retrospektif mereka dianalisis sebagai praktik diskursif yang memperlihatkan bagaimana norma pernikahan diinternalisasi, dinegosiasikan, dan dipertanyakan dalam pengalaman hidup. Hasil analisis menunjukkan bahwa keniscayaan pernikahan diproduksi melalui tiga strategi utama: transendentalisasi, yang menautkan pernikahan dengan kehendak ilahi; institusionalisasi, yang menempatkannya dalam jaringan hukum, keluarga, dan birokrasi sosial; serta normalisasi, yang menetapkannya sebagai satu-satunya jalur hidup yang wajar. Ketiga strategi ini diperkuat oleh prosedur eksklusif yang menstigma perceraian sebagai deviasi moral dan kegagalan personal. Dengan demikian, artikel ini menunjukkan bahwa apa yang tampak sebagai “takdir” sesungguhnya merupakan hasil dari operasi diskursif yang kompleks dalam membentuk norma, kebenaran, dan subjektivitas mengenai pernikahan.

Kata kunci: genealogi, institusionalisasi, normalisasi, pernikahan, transendentalisasi

Constructing Marital Destiny: Transcendentalization, Institutionalization, and Normalization

Abstract

In many societies, including Indonesia, marriage is often regarded as a natural and inevitable life stage. It appears as a form of “social destiny” that is rarely questioned. This article approaches such inevitability not as a natural fact but as an effect of discourse and power relations. Drawing on Foucauldian discourse theory

and a genealogical approach, the study traces the discursive mechanisms that construct marriage as something natural, reasonable, and final. Data were obtained through in-depth interviews with four middle-class informants—two men and two women—who had experienced marriage and subsequent divorce. Their retrospective narratives are analyzed as discursive practices that reveal how marital norms are internalized, negotiated, and contested within lived experience. The analysis shows that the perceived inevitability of marriage is produced through three main strategies: transcendentalization, which links marriage to divine will; institutionalization, which embeds it within legal, familial, and bureaucratic structures; and normalization, which frames it as the only reasonable life trajectory. These strategies are further reinforced by procedures of exclusion that stigmatize divorce as moral deviance and personal failure. The article thus demonstrates that what appears as marital “destiny” is in fact the cumulative effect of discursive operations that shape norms, truth, and subjectivity surrounding marriage.

Keywords: *genealogy, institutionalization, marriage, normalization, transcendentalization*

Pendahuluan

Pernikahan hadir sebagai takdir sosial yang diterima begitu saja, dianggap alami, tak terhindarkan, dan jarang dipertanyakan. Kebenaran pernikahan dianggap kodrati, melebur dalam nilai-nilai agama, hukum, percakapan sehari-hari, dan ideal romantis dalam budaya populer. Sejak kecil, kita tumbuh dengan anggapan bahwa menikah adalah langkah berikutnya. Pertanyaan yang muncul bukannya mengapa demikian, bagaimana bisa demikian, tetapi bagaimana cara mencapainya. Ada semacam konsensus: bila tidak menikah, hidup tidak lengkap dan tak bahagia.

Khususnya di Indonesia, mengelak dari pernikahan bukan perkara yang mudah. Bagi romansa dan seks, pernikahan adalah satu-satunya ruang yang sah, sehingga bila orang memiliki hasrat akan satu atau keduanya, hampir tidak ada pilihan lain. Maka, mereka yang mungkin tidak begitu ingin menikah akhirnya banyak yang terdesak oleh tekanan sosial, agama, dan bahkan hukum. Pacaran tidak boleh lama-lama, karena ia bukanlah bentuk hubungan yang “betulan”. Sementara, kohabitasi atau “kumpul kebo” ialah dosa, bahkan ilegal. Maka, lewat kerja lintas institusi, pernikahan menjadi sebuah bentuk disiplin kultural.

Meskipun demikian, banyak kajian mengenai pernikahan masih berfokus pada fungsi sosial, stabilitas keluarga, atau kualitas relasi interpersonal, sementara proses diskursif, yang membuat pernikahan tampak alamiah dan niscaya, cenderung kurang dipersoalkan. Mengikuti pemikiran Michel Fouca-

ult, artikel ini memandang keniscayaan tersebut bukan sebagai fakta kodrati, melainkan sebagai efek dari kerja wacana dan relasi kuasa. Wacana dipahami tidak sekadar mencerminkan realitas, tetapi juga memproduksi objek, norma, dan subjek yang dibicarakannya.

Untuk menelusuri proses tersebut, artikel ini menggunakan narasi perceraian sebagai titik masuk analisis. Perceraian dipilih bukan semata-mata sebagai pengalaman kegagalan relasi, tetapi sebagai momen ketika asumsi-asumsi tentang pernikahan menjadi terlihat dan dapat dipersoalkan. Ketika pernikahan retak atau berakhir, individu sering kali mulai merefleksikan norma, tuntutan, dan bentuk subjektivitas yang sebelumnya diterima begitu saja. Dengan demikian, narasi perceraian memungkinkan penelusuran terhadap bagaimana wacana pernikahan diinternalisasi, dinegosiasikan, maupun dipertanyakan, dalam pengalaman hidup individu.

Berdasarkan kerangka tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana keniscayaan pernikahan diproduksi melalui operasi wacana dan relasi kuasa. Secara khusus, artikel ini mengajukan pertanyaan: strategi diskursif apa yang membentuk pernikahan sebagai sesuatu yang alamiah dan tak terhindarkan? Dengan menggunakan pendekatan genealogis Foucauldian, artikel ini berupaya menelusuri strategi-strategi kuasa yang bekerja dalam membentuk pernikahan sebagai “takdir” yang niscaya.

Pernikahan sebagai Norma Sosial: Tinjauan Pustaka

Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa pernikahan masih dipandang sebagai norma sosial utama dan penanda kedewasaan moral. Dalam konteks Indonesia, mayoritas individu yang belum menikah memiliki intensi kuat untuk menikah. Ini menandakan kuatnya ekspektasi sosial terhadap pernikahan sebagai capaian hidup yang diharapkan.¹ Tekanan tersebut tidak hanya hadir dalam bentuk dorongan interpersonal dari keluarga dan lingkungan sosial, tetapi juga melalui konstruksi kultural mengenai kehidupan yang dianggap “lengkap”, “stabil”, dan “dewasa”.

¹ Karel K. Himawan, “Either I Do or I Must: An Exploration of the Marriage Attitudes of Indonesian Singles,” *The Social Science Journal*, advance online publication, 2018, <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2018.07.007>; Karel K. Himawan, Matthew Bambling, dan Sisira Edirippulige, “What Does It Mean to Be Single in Indonesia? Religiosity, Social Stigma, and Marital Status Among Never-Married Indonesian Adults,” *SAGE Open* 8, no. 3 (2018), <https://doi.org/10.1177/2158244018803132>.

Studi lintas budaya juga menunjukkan bahwa individu yang tidak menikah kerap diposisikan sebagai belum lengkap atau gagal secara sosial.² Di berbagai konteks Asia, status lajang sering diasosiasikan dengan ketidakmatangan, kegagalan relasional, atau deviasi dari jalur hidup normatif.³ Dalam banyak kelompok masyarakat di Asia yang masih menempatkan keluarga sebagai institusi sosial utama, pernikahan menjadi bentuk pemenuhan kewajiban sosial terhadap keluarga dan komunitas.⁴ Dengan demikian, status menikah berfungsi sebagai sumber legitimasi sosial dan moral.

Selain diposisikan sebagai capaian personal, pernikahan juga merupakan institusi yang diatur dan dilegitimasi melalui konfigurasi sosial yang lebih luas, termasuk agama, negara, hukum, keluarga, dan norma gender. Secara historis dan sosiologis, pernikahan dipahami sebagai mekanisme pengaturan reproduksi, aliansi keluarga, serta distribusi sumber daya dan tanggung jawab sosial.⁵ Dalam konteks hukum modern, pernikahan juga menentukan akses administratif, status legal, dan pengakuan sosial tertentu.⁶

² Shakila Singh, "Women Want Love, Men Want Wives: The Discourse of Romantic Love in Young Adults' Future Marriage Goals," *Agenda: Empowering Women for Gender Equity* 27, no. 2 (2013): 22–29, <https://doi.org/10.1080/10130950.2013.808798>.

³ Nayab Bukhari dan Mehwish Riaz, "Social-Cultural Stigmas and Encounters Faced by 'Still Unmarried' Women and Their Families," *Journal of World Research* 3, no. 2 (2023): 1–8, <https://jwr.bwo-researches.com/index.php/jwr/article/view/44>; Cutie Bacubas Canesares dkk., "Through the Lens of Solitude: Capturing the Realities of Singlehood Stigma Among Women," *11th International Scholars Conference* 11, no. 2 (2024): 567–78, <https://jurnal.unai.edu/isc/article/view/3493>.

⁴ Swarnima Bhargava, "Working with Young Women Facing Pressure to Marry," *International Journal of Narrative Therapy & Community Work*, no. 2 (2022): 38–46; Tianhan Gui, "Coping with Parental Pressure to Get Married: Perspectives from Chinese 'Leftover Women,'" *Journal of Family Issues* 44, no. 8 (2023): 2118–37.

⁵ Helen E. Fisher, *Anatomy of Love: The Natural History of Monogamy, Adultery, and Divorce* (New York: Simon & Schuster, 1993); Scott Coltrane dan Michele Adams, "The Social Construction of the Divorce 'Problem': Morality, Child Victims, and the Politics of Gender," *Family Relations* 52, no. 4 (2003): 363–72, <https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2003.00363.x>; Mario Liong, "Re-Negotiating Fatherhood: Divorced Fathers in Hong Kong Experiencing and Resisting Stigma," *Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific*, no. 39 (2016).

⁶ Eric P. Voigt, "Reconsidering the Mythical Advantages of Cohabitation: Why Marriage Is More Efficient Than Cohabitation," *Indiana Law Journal* 78 (2003): 3.

Dalam konteks Indonesia, pernikahan yang juga dilegitimasi melalui kerja lintas institusi agama dan hukum menunjukkan kuatnya fungsi normatif pernikahan.⁷ Negara hanya mengakui pernikahan yang disahkan secara religius, sehingga legitimasi pernikahan sekaligus menjadi legitimasi moral dan iman. Ajaran agama menempatkan pernikahan sebagai ibadah atau sakramen, sementara praktik hukum dan sosial menegaskan bahwa relasi seksual dan reproduksi yang sah hanya dapat berlangsung di dalamnya. Melalui konfigurasi ini, pernikahan tampil sebagai kebenaran yang tampak kodrati dan transenden.

Berbagai kajian feminisme dan gender juga menunjukkan bahwa institusi pernikahan mereproduksi norma gender tertentu, termasuk pembagian peran domestik dan idealisasi keluarga heteronormatif.⁸ Ekspektasi mengenai laki-laki sebagai pencari nafkah, perempuan sebagai penjaga relasi domestik, maupun idealisasi keluarga harmonis, menjadi bagian dari norma yang membentuk pengalaman pernikahan secara berbeda bagi laki-laki dan perempuan.⁹ Dalam konteks Indonesia, Bennett menunjukkan bagaimana modernitas, Islam, dan norma keluarga berkelindan dalam membentuk ekspektasi terhadap perempuan, seksualitas, dan pernikahan.¹⁰ Pengalaman pernikahan tidak dapat dilepaskan dari posisi gender subjek dalam konfigurasi sosial yang lebih luas.

Di sisi lain, pernikahan modern tidak lagi semata dipahami sebagai kewajiban tradisional atau institusional, tetapi juga sebagai ruang pemenuhan emosional, cinta romantis, *companionship*, dan realisasi diri. Kajian mengenai budaya populer dan romantisme modern menunjukkan bahwa media, narasi cinta, dan budaya konsumsi membangun imaji pernikahan sebagai puncak kebahagiaan personal dan hubungan ideal.¹¹ Dalam konteks ini, pa-

⁷ Jean Carabine, "Unmarried Motherhood 1830–1990: A Genealogical Analysis," dalam *Discourse as Data: A Guide for Analysis* (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2001), 267–309.

⁸ Maria McCabe, "Heteronormativity: The Bias Underlying Marriage, Gender Roles, Sex Discrimination, and Custody Determinations," *U. Tol. L. Rev* 53 (2021): 127; Jaquoya Carreiro, "Gender Role Beliefs, Household Chores, and Modern Marriages" (PhD Thesis, Antioch University, 2021).

⁹ Rose Alison Anna Brett, "Views of Traditions and Gender Roles in Heterosexual Relationships" (PhD Thesis, University of Surrey, 2023).

¹⁰ Linda Rae Bennett, *Women, Islam and Modernity: Single Women, Sexuality and Reproductive Health in Contemporary Indonesia* (London: Routledge, 2005).

¹¹ Rachel Lawes, "Marriage: An Analysis of Discourse," *British*

sangan diposisikan bukan hanya sebagai partner sosial, tetapi juga *soulmate* yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan emosional individu modern.

Transformasi ini membuat pernikahan modern bekerja dalam dua logika sekaligus: sebagai kewajiban sosial dan sebagai proyek personal pencarian kebahagiaan.¹² Hubungan romantis menjadi bagian dari pembentukan identitas diri, sementara keberhasilan relasi dipandang sebagai refleksi keberhasilan personal.¹³ Dalam banyak konteks urban kelas menengah, *companionship*, kecocokan emosional, dan keintiman menjadi elemen penting dalam keputusan menikah.

Sejumlah penelitian yang lebih baru mulai melihat pernikahan sebagai konstruksi diskursif yang dinegosiasikan dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Dalam konteks *urban middle-class* India, Chatterjee menunjukkan bahwa pernikahan menjadi arena negosiasi antara ideal modern mengenai kesetaraan gender dan ekspektasi patriarkal yang tetap bertahan dalam kehidupan domestik.¹⁴ Senada dengan itu, Lamba memperlihatkan bagaimana perempuan urban kelas menengah di India menegosiasikan relasi intim, keluarga, seksualitas, dan ekspektasi sosial di tengah perubahan nilai moderni-

Journal of Social Psychology 38, no. 1 (1999): 1–20, <https://doi.org/10.1348/014466699164004>; Christine Bachen dan Eva Illouz, “Imagining Romance: Young People’s Cultural Models of Romance and Love,” *Critical Studies in Mass Communication* 13, no. 4 (1996): 279–308, <https://doi.org/10.1080/15295039609366983>; Claire Brechet, “Representation of Romantic Love in Children’s Drawings: Age and Gender Differences,” *Social Development* 24, no. 3 (2015), <https://doi.org/10.1111/sode.12113>.

¹² Athira Krishnan KT dan Atiq Ahmed, “‘Marriage Should Not Mean Losing Myself’: Changing Expectations and Relationship Concerns among Unmarried Young Adults in Kerala,” *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 2025, 1–18; Arianne M. Gaetano, “Social Mobility and Single Women’s Marriage Dilemma in Urban China,” *American Behavioral Scientist* 70, no. 6 (2026): 764–79.

¹³ Julia Richter dan Christine Finn, “Transactions Between Self-Esteem and Perceived Conflict in Romantic Relationships: A 5-Year Longitudinal Study,” *PloS One* 16, no. 4 (2021): e0248620; Carrie R. Underwood dan Rachael D. Robnett, “Benevolent Sexism, Attachment Style, and Contingent Self-Esteem Help to Explain How People Anticipate Responding to a Troubled Romantic Relationship,” *Journal of Applied Social Psychology* 55, no. 12 (2025): 1063–78.

¹⁴ Sanhita Chatterjee, “Conflicting Ideals and Practices: Gender, Marriage and Norms within the Urban Middle Classes in Contemporary India” (PhD Thesis, University of Essex, 2022).

tas.¹⁵ Kajian lain mengenai intimasi modern juga menunjukkan bahwa cinta, *companionship*, dan hubungan romantis semakin dipahami sebagai bagian dari proyek identitas diri dalam masyarakat global kontemporer.¹⁶ Sementara itu, studi-studi berbasis analisis wacana kritis menunjukkan bahwa preferensi pasangan, gender ideal, dan nilai keluarga, direproduksi melalui bahasa dan representasi sosial tertentu, termasuk dalam praktik pencarian pasangan dan iklan matrimonial.¹⁷

Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa pernikahan tidak semata merupakan institusi sosial yang statis, tetapi juga ruang produksi makna, negosiasi identitas, dan reproduksi norma sosial. Dengan demikian, studi mengenai pernikahan telah bergerak melampaui pendekatan struktural semata dan mulai memperhatikan dimensi diskursif dalam pembentukan relasi intim, gender, dan keluarga.

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada representasi budaya, negosiasi identitas, atau reproduksi norma dalam konteks tertentu. Relatif sedikit yang menelaah bagaimana pernikahan diproduksi sebagai sesuatu yang tampak niscaya, alamiah, dan sulit dipertanyakan dalam pengalaman subjektif sehari-hari. Selain itu, studi mengenai pernikahan umumnya berfokus pada individu yang sedang menjalani relasi atau pada institusi keluarga secara umum, sementara penggunaan narasi perceraian retrospektif untuk membaca kembali bagaimana keniscayaan pernikahan dibentuk dan dipertahankan masih relatif terbatas.

Berangkat dari celah tersebut, artikel ini tidak berupaya menggantikan pendekatan-pendekatan sebelumnya, melainkan memperluas pembacaan mengenai pernikahan sebagai konstruksi sosial dengan menelaah bagaimana

¹⁵ Tanya Lamba, "At the Crossroads of Marriage: Experiences of Young Urban Middle-Class Women Negotiating Family and Sexuality Within Heterosexual Intimate Relationships in North India," *Changing Societies & Personalities* 6, no. 4 (2022): 965–79.

¹⁶ Bahira Trask, "Love in a Time of Globalization: Intimacy Re-Imagined Across Cultural Flows," dalam *International Handbook of Love: Transcultural and Transdisciplinary Perspectives* (Cham: Springer Nature Switzerland, 2025), 1–17.

¹⁷ Ifrah Fatima dan Rukhsar Anwar, "From Discourse to Marriage: A Comparative Critical Discourse Analysis of Pakistani Matrimonial Profiles," *International Premier Journal of Languages & Literature* 3, no. 3 (2025): 614–39; Shah Nawaz Khan, Sahibzada Wasim Iqbal, dan Muhammad Imran, "Commodification of Women in Pakistani Newspaper Matrimonial Advertisements: A Critical Discourse Analysis of Jang and Dawn Newspaper Classifieds," *ASSAJ* 4, no. 02 (2025): 1225–34.

keniscayaan pernikahan diproduksi dan dinegosiasikan dalam pengalaman personal individu yang telah mengalami perceraian. Dengan menggunakan pendekatan Foucauldian, artikel ini memfokuskan perhatian pada mekanisme diskursif yang membuat pernikahan tampil sebagai sesuatu yang alami, wajar, dan tak terhindarkan dalam kesadaran sosial maupun personal.

Kerangka Teoretis: Teori Wacana Foucauldian

Studi ini didasarkan pada pendekatan diskursif Foucauldian. Wacana dipahami sebagai sekumpulan pernyataan yang—baik secara sejalan maupun kontradiktoris—merepresentasikan pengetahuan tentang topik tertentu pada momen historis tertentu. Semua praktik sosial memiliki makna yang membentuk dan memengaruhi apa yang kita lakukan, dan karenanya selalu mengandung aspek diskursif. Kerangka pemikiran Foucault mengenai operasi wacana yang demikian tidak terlepas dari caranya memandang kekuasaan. Bagi Foucault, kekuasaan bekerja sebagai jejaring, bersifat produktif, berpotensi melahirkan perilaku baru, dan selalu melahirkan resistensi.¹⁸

Sejalan dengan gagasan bahwa kuasa itu produktif, demikian pula wacana bersifat produktif. Foucault,¹⁹ menyatakan bahwa wacana adalah, “praktik-praktik yang secara sistematis membentuk objek yang dibicarakannya.” Wacana memproduksi makna, dan selanjutnya memproduksi dampak kuasa (*power effect*).²⁰ Ia menetapkan batasan mengenai kemungkinan pemahaman suatu objek. Ia pertama-tama menetapkan objek itu sendiri—apa yang penting atau tidak penting untuk diperhatikan atau dibicarakan. Dengan kata lain, ia menetapkan objek sebagai “nyata”.²¹ Selanjutnya, wacana juga mengonstruksi objek yang dibicarakannya sebagai benar dalam suatu waktu atau momen historis tertentu. Bagi Foucault, kebenaran bukanlah sesuatu yang intrinsik, melainkan sesuatu yang diproduksi oleh masyarakat melalui wacana, dan

¹⁸ Michel Foucault, *The History of Sexuality* (New York: Pantheon Books, 1978); Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977*, ed. oleh Colin Gordon (New York: Pantheon Books, 1980); Sara Mills, *Discourse* (London: Routledge, 1997).

¹⁹ Michel Foucault, *The Archaeology of Knowledge* (New York: Pantheon Books, 1972), 49.

²⁰ Carabine, “Unmarried Motherhood.”

²¹ Michel Foucault, “Power and Strategies,” dalam *Michel Foucault: Power, Truth, Strategy*, ed. oleh Meaghan Morris dan Paul Patton (Sydney: Feral Publications, 1979), 48–58.

dapat berubah-ubah seiring waktu sesuai konsensus zaman.²² Ini dirujuknya sebagai “rezim kebenaran”.

Untuk mengonstruksi suatu versi tertentu mengenai objek sebagai benar, wacana memiliki mekanisme internal dan mekanisme distribusi tertentu.²³ Mekanisme ini di antaranya menyangkut pengulangan lewat *commentary*, di mana wacana terus diinterpretasi dan direinterpretasi dalam batas norma yang ditetapkan teks induknya, sehingga kebenaran ini menggaung di mana-mana—*ubiquitous*. Mekanisme ini juga menentukan distribusi otoritas diskursif—siapa yang berhak bicara, kapan, di mana, dan dengan cara seperti apa kebenaran dapat dinyatakan.²⁴ Di dalam distribusinya, wacana bersifat institusional, yakni terdapat berbagai lembaga masyarakat yang terlibat dalam penyebaran dan pengukuhannya, misalnya lembaga pendidikan, agama, hukum, dan sebagainya.

Selain lewat mekanisme internal, objek dikonstruksi sebagai benar dengan dilawankan dengan objek lain untuk dikonstruksi sebagai salah—yang dijelaskan Foucault sebagai bagian dari prosedur eksklusi dalam wacana.²⁵ Bila pernikahan dikonstruksi sebagai benar, maka hal-hal yang berlawanan dengannya, misalnya tidak menikah, berselingkuh, atau bercerai dikonstruksi sebagai salah. Prosedur eksklusi ini menyangkut: (1) larangan (*prohibition*), yakni apa yang boleh, atau tidak boleh dibicarakan; (2) pembedaan antara subjek yang “waras” dan “gila”; dan (3) pengukuhan kebenaran itu sendiri lewat penyingkiran hal-hal yang tidak sesuai dengannya—dirujuk Foucault sebagai “*will to truth*”.²⁶

Sehubungan dengan gagasan mengenai prosedur eksklusi, Foucault juga menekankan bahwa wacana tidak hanya terbentuk dari apa yang dikatakan dan apa yang dipraktikkan, tetapi—terutama—pada apa yang tidak dikatakan dan tidak dipraktikkan. Sesuatu dapat dipandang sebagai hakiki, mutlak, dan tidak perlu dipertanyakan, sebagai efek dari segala yang dipinggirkan, diam, absen, dan tidak masuk dalam pembicaraan. Mekanisme absen ini dijelaskan Foucault sebagai kesunyian yang produktif (*productive silence*) karena

²² Mills, *Discourse*.

²³ Michel Foucault, “The Order of Discourse,” *Social Science Information* 10, no. 2 (1971): 7–30, <https://doi.org/10.1177/053901847101000201>.

²⁴ Graham R. Gibbs, “Discourse Analysis Part 2: Foucauldian Approaches,” YouTube Video, 2015, https://www.youtube.com/watch?v=E_ffCsQx2Cg.

²⁵ Foucault, “Order of Discourse.”

²⁶ Foucault, “Order of Discourse.”

dengan tidak membicarakan sesuatu, wacana justru mengukuhkan batas norma.²⁷

Dampak kuasa utamanya dapat dilihat dari adanya proses normalisasi, yakni penetapan norma mengenai apa yang dianggap normal dan pantas dalam masyarakat. Foucault menunjukkan bahwa proses normalisasi beroperasi dengan membandingkan, mengukur, dan menilai individu berdasarkan standar tertentu.²⁸ Melalui proses ini, individu tidak hanya dikategorikan secara biner—seperti sehat/sakit, waras/gila, baik/buruk—tetapi juga diarahkan untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma yang telah ditetapkan, menjadikannya tujuan yang diinternalisasi dan dijadikan ukuran bagi perilaku dan nilai diri sendiri.

Untuk memahami bagaimana normalisasi tidak hanya beroperasi melalui wacana atau bahasa, Foucault memperkenalkan konsep *dispositif*.²⁹ *Dispositif* mencakup seluruh jaringan elemen diskursif dan non-diskursif—seperti institusi, regulasi hukum, kebijakan negara, atau bahkan arsitektur—yang bersama-sama mempertahankan relasi kuasa dalam masyarakat. Normalisasi, dengan demikian, bukanlah bentuk kuasa yang koersif secara langsung, melainkan bentuk kuasa yang bekerja melalui regulasi halus atas apa yang layak, pantas, dan diharapkan.

Bagi Foucault, kelahiran subjek itu sendiri merupakan dampak kuasa. Foucault menolak gagasan mengenai subjek yang berdaulat (*sovereign subject*), atau yang dikenal sebagai subjek Cartesian. Subjek adalah hasil dari kondisi sosial, institusional, dan diskursif pada zamannya—semata-mata lokus bagi operasi kekuasaan. Ia adalah alat, sarana, kendaraan bagi kuasa.³⁰ Subjektivitas adalah hasil dari proses “subjektivasi” (*subjectivation*), yakni proses di mana individu dibentuk sebagai subjek melalui berbagai teknologi kuasa, termasuk melalui mekanisme disiplin dan teknologi diri. Melalui wacana, subjek diposisikan sebagai tempat tertentu dalam jejaring kekuasaan, dan diberi nilai tertentu: ada yang diposisikan sebagai berhasil, ada yang diposisikan sebagai gagal, baik, buruk, dan sebagainya. Berdasar posisi-posisi dalam jejaring kuasa inilah, wacana menciptakan pengalaman subjektif diri

²⁷ Foucault, *History of Sexuality*.

²⁸ Michel Foucault, *Discipline and Punish* (New York: Pantheon Books, 1977).

²⁹ Foucault, *Power/Knowledge*.

³⁰ Foucault, *Power/Knowledge*.

kita.³¹ Kita tidak hanya menerima praktik-praktik atau wacana dan gagasan yang menyertainya, tetapi juga menginternalisasi “kebenaran” tentang siapa diri kita. Kita menempatkan diri dalam peta konseptual yang disediakan wacana dengan cara: (1) mengambil peran yang didefinisikan oleh wacana dan (2) mengenali dan memikirkan diri kita dalam istilah-istilah atau aturan tersebut.³²

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam untuk menelusuri bagaimana keniscayaan pernikahan diproduksi, dinegosiasikan, dan dipertanyakan dalam pengalaman hidup individu. Penelitian melibatkan empat informan kelas menengah berusia 40-an tahun, terdiri atas dua laki-laki dan dua perempuan, dengan latar belakang pendidikan tinggi dan pengalaman pernikahan heteroseksual yang berakhir pada perceraian. Informan berasal dari konteks urban di Yogyakarta dan telah bercerai lebih dari lima tahun pada saat wawancara dilakukan. Seluruh informan memiliki anak dan mengalami pernikahan dalam rentang usia 20–30 tahun, dengan durasi pernikahan yang bervariasi: dari kurang dari sepuluh tahun hingga hampir dua dekade. Wawancara dilakukan dalam satu hingga dua sesi untuk masing-masing informan selama rentang sekitar enam bulan, dengan durasi sekitar dua hingga lima jam per sesi. Seluruh wawancara dilakukan secara langsung (*offline*), direkam, dan ditranskripsikan secara verbatim.

Informan dipilih secara purposif berdasarkan kemampuan reflektif mereka dalam menarasikan pengalaman hidup. Fokus pada informan kelas menengah berpendidikan dilakukan bukan untuk merepresentasikan seluruh pengalaman, melainkan untuk memperoleh narasi yang kaya secara reflektif dan memungkinkan eksplorasi terhadap bahasa moral, psikologis, dan sosial yang digunakan individu dalam memaknai pengalaman pernikahan dan perceraian mereka. Seluruh informan berasal dari generasi yang tumbuh dewasa pada era pasca-Reformasi dan mengalami pernikahan dalam konteks sosial Indonesia kontemporer, ketika wacana mengenai keluarga, agama, relasi romantis, dan individualitas mengalami perubahan sekaligus negosiasi baru.

Meskipun fokus artikel ini adalah pada konstruksi diskursif mengenai keniscayaan pernikahan, narasi yang dianalisis berasal dari individu yang te-

³¹ Gibbs, “Discourse Analysis.”

³² Gibbs, “Discourse Analysis.”

lah mengalami perceraian. Pilihan ini bukan merupakan kontradiksi metodologis. Dalam kerangka Foucauldian, norma sosial sering kali menjadi paling terlihat justru pada momen ketika ia dipertanyakan, dilanggar, atau gagal dipertahankan. Perceraian menghadirkan friksi di mana berbagai norma mengenai pernikahan—seperti kewajiban mempertahankan hubungan, stigma kegagalan, dan definisi keberhasilan relasi—menjadi eksplisit dalam pengalaman individu. Dengan demikian, narasi perceraian menyediakan medan analitis yang kaya untuk menelusuri bagaimana keniscayaan pernikahan diproduksi, dinegosiasikan, dan dipertanyakan dalam kehidupan sehari-hari.

Wawancara dilakukan dengan pendekatan dialogis-rizomatik,³³ yaitu pendekatan yang menempatkan pengalaman hidup (*lived experience*) individu sebagai ruang pertemuan antara agensi personal dan kuasa wacana. Pendekatan ini memungkinkan narasi personal mengalir, sambil tetap membuka ruang kritis untuk mengurai bagaimana wacana sosial menyusup ke dalam pengalaman hidup. Wawancara dilakukan secara semiterstruktur dengan pendekatan yang memungkinkan narasi berkembang secara terbuka mengikuti alur pengalaman informan. Wawancara umumnya dimulai dari kronologi pertemuan pasangan, proses menuju pernikahan, dinamika relasi selama pernikahan, hingga perceraian dan refleksi setelahnya. Meskipun peneliti menggunakan panduan wawancara dasar, percakapan dibiarkan berkembang secara dialogis untuk memberi ruang bagi informan dalam membangun narasi dan menekankan aspek-aspek pengalaman yang mereka anggap penting. Dalam beberapa kasus, wawancara lanjutan dilakukan untuk memperjelas detail tertentu atau memperdalam tema yang muncul selama proses analisis.

Narasi yang dianalisis dalam penelitian ini bersifat retrospektif. Informan diminta menceritakan pengalaman pernikahan dan perceraian mereka setelah peristiwa tersebut berlalu. Ini merupakan pilihan metodologis yang tidak bertujuan menangkap pengalaman emosional dalam momen kejadian, melainkan menelaah bagaimana pengalaman tersebut dimaknai ulang, dinegosiasikan, dan dirangkai menjadi narasi diri. Cara mereka bercerita—apakah dengan penyesalan, rasionalisasi, refleksi, atau penekanan pada “hikmah”—merupakan bagian dari strategi *coping* sekaligus proses pembentukan subjektivitas pasca-pengalaman krisis. Dalam kerangka genealogis, fokus bukan terletak pada

³³ Paula Saukko, *Doing Research in Cultural Studies: An Introduction to Classical and New Methodological Approaches* (London: SAGE Publications, 2003); Paula Saukko, *The Anorexic Self: A Personal, Political Analysis of a Diagnostic Discourse* (Albany: State University of New York Press, 2008).

pengalaman “apa adanya”, melainkan pada proses bagaimana subjek—melalui jarak waktu dan refleksi—membentuk kebenaran tentang dirinya sendiri.

Sebagai panduan analisis, penelitian ini meminjam dan memodifikasi metode genealogi Foucauldian yang dirumuskan oleh Carabine.³⁴ Setelah transkripsi selesai, data dibaca secara berulang untuk mengidentifikasi pola diskursif, kontradiksi, bentuk legitimasi, serta posisi-posisi subjek yang muncul dalam narasi. Unit analisis dalam penelitian ini bukan semata kalimat secara gramatikal, melainkan *enoncé* atau *statement* dalam pengertian Foucauldian, yakni pernyataan yang memiliki fungsi diskursif tertentu dalam membentuk makna dan kebenaran mengenai pernikahan, perceraian, moralitas, maupun identitas diri. Proses *coding* dilakukan secara manual menggunakan tabel kategorisasi untuk memetakan tema-tema yang berulang, bentuk justifikasi yang digunakan informan, serta pertemuan antara pengalaman personal dan repertoar wacana sosial yang lebih luas.

Tema-tema analitis, seperti transendentalisasi, institusionalisasi, dan normalisasi, tidak ditentukan sejak awal, melainkan dikembangkan secara induktif melalui pola yang muncul dari narasi informan. Interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial-kultural Indonesia sebagai medan produksi dan sirkulasi wacana mengenai pernikahan. Untuk menjaga ketelitian interpretatif, analisis dilakukan melalui pembacaan berulang antarnarasi, perhatian terhadap kontradiksi dan ketegangan dalam cerita, serta refleksi terus-menerus terhadap posisi peneliti dalam proses interpretasi data.

Pembahasan

Bagian ini akan berupaya menelusuri dan memetakan mekanisme yang melahirkan keniscayaan pernikahan. Apa sebenarnya arti pernikahan sebagai niscaya? Artinya—secara sederhana—ketika orang tidak lagi menanyakan “kenapa?”, tetapi menerimanya saja sebagai sesuatu yang *taken for granted*. Ada unsur predeterminasi di situ, bahwa demikianlah jalan yang “alami”. Dalam konteks Indonesia kontemporer, keniscayaan ini tidak hanya diproduksi melalui agama, tetapi juga melalui keluarga, hukum, relasi gender, budaya populer, dan sistem sosial yang menjadikan pernikahan sebagai bentuk kehidupan dewasa yang paling sah.

Narasumber pertama, sebut saja Nina, di dalam kisahnya, menceritakan bahwa ia pertama kali memikirkan jodoh selepas SMA. Di hari ulang tahun-

³⁴ Carabine, “Unmarried Motherhood.”

nya, ia mengujubkan sebuah doa, “Tuhan, kalau aku sudah boleh punya pacar, aku pengen punya pacar.” Pernyataan “sudah boleh” yang diucapkannya menyiratkan bahwa pernikahan dipandang sebagai sebuah pengalaman universal dan natural—sebuah jenjang hidup yang cepat atau lambat akan ditempuh oleh individu. Ada ketundukan pada otorisasi moral tertentu di sini. Pertanyaannya, bagaimana gagasan ini bisa “sampai” kepada individu, termasuk Nina?

Strategi pertama yang digunakan untuk membangun keniscayaan pernikahan ialah *transendentalisasi*, di mana pernikahan ditempatkan dalam posisi yang bersifat “keilahian”, *melampaui manusia*. Dalam konteks Indonesia, strategi ini terutama bekerja melalui wacana religius yang memosisikan hubungan berpasangan sebagai bagian dari kehendak ilahi. Pernyataan “sudah boleh” mengandung logika otorisasi moral: Nina tidak *memutuskan* ia ingin punya pacar—ia *meminta izin* kepada Tuhan. Melalui transendentalisasi, kuasa bekerja lewat internalisasi moral religius. Tidak ada figur otoritas yang menyuruhnya langsung, tapi ia sudah belajar memeriksa dirinya sendiri sebelum bertindak—*governance through the self*.

Setelah mengujubkan doa itu, Nina menceritakan bahwa ia mendapat pacar pertamanya, Adit, “Itulah dia datang.” Pernyataan ini menegaskan hubungan kausal antara ujub doanya dan kehadiran Adit. Hubungan tersebut dipahami sebagai bagian dari logika takdir. Di sini tampak bahwa di dalam interaksi antara wacana dan individu, bukan saja wacana secara oportunistik menyusup dalam kepala individu, tetapi individu juga sebaliknya secara oportunistik menggunakan wacana yang diinternalisasinya sebagai legitimasi.

Transendentalisasi bekerja melalui pengulangan dan sirkulasi wacana religius dalam kehidupan sehari-hari. Ujaran seperti “jodoh ada di tangan Tuhan” atau “manusia diciptakan berpasang-pasangan” terus direproduksi melalui keluarga, institusi agama, pendidikan, maupun percakapan sosial sehari-hari, hingga akhirnya tampil sebagai *common sense*. Akibatnya, hubungan heteroseksual dan pernikahan tidak lagi dipahami sebagai salah satu kemungkinan hidup, melainkan sebagai jalan yang tampak alamiah dan telah “digariskan”.

Namun, operasi transendensi tidak selalu hadir dalam bentuk religius formal. Dalam narasi Taufik, misalnya, awal kedekatannya dengan Sarah justru dikaitkan dengan permainan jalangkung. Ketika jalangkung “menunjuk” mereka sebagai pasangan yang saling menyukai, pengalaman tersebut tetap dimaknai dalam logika predestinasi: hubungan mereka terasa seperti sesuatu

yang “sudah ditentukan”. Ini menunjukkan bahwa logika transendensi bekerja melampaui institusi agama formal dan menyusup ke dalam berbagai bentuk kepercayaan populer dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui transendentalisasi, hubungan berpasangan diposisikan sebagai sesuatu yang melampaui kehendak individual. Relasi romantis tidak lagi semata menyangkut “aku dan kamu”, tetapi melibatkan otoritas yang lebih besar: Tuhan, takdir, moralitas, atau tatanan simbolik yang dianggap berada di atas manusia. Di sini, sebenarnya kita dapat melihat bagaimana strategi transendentalisasi mulai berkelindan dengan strategi kedua, *institusionalisasi*.

Jika transendentalisasi memberi legitimasi moral dan spiritual, maka institusionalisasi mematerialkan legitimasi tersebut ke dalam sistem sosial yang konkret: keluarga, hukum, administrasi negara, dan norma sosial. Dalam konteks Indonesia, hubungan romantis yang dianggap sah secara sosial pada akhirnya diarahkan menuju pernikahan. Bentuk relasi lain—pacaran jangka panjang, kohabitasi, atau *partnership* nonformal—cenderung diposisikan sebagai hubungan yang “tidak jelas”, “menggantung”, atau belum benar-benar serius.

Ini tampak, baik dalam narasi narasumber ketiga, Agustina, maupun Nina. Di dalam narasi Agustina, sejak awal hubungan, Jefri, pasangannya, dengan terang-terangan menyatakan bahwa ia sudah tidak mencari pacar, melainkan mencari istri, supaya “pasti”. Sama dengan Nina, yang dengan suami keduanya, Catur, sejak awal bersepakat ingin menikah, bukan pacaran.

Melalui institusionalisasi, hubungan berpasangan dimasukkan ke dalam sistem hukum, birokrasi, ritual, dan adat masyarakat yang mematerialkan kebenaran spiritualnya. Bila lewat transendentalisasi Tuhan telah ditambahkan sebagai pihak ketiga, maka, lewat institusionalisasi, urusan “dua orang + Tuhan” itu kini menjadi urusan negara, urusan hukum, urusan keluarga besar, dan urusan masyarakat luas. Takdir, pada titik ini, resmi dicetak dalam dokumen negara dan diumumkan ke publik.

Namun, bahkan sebelum resmi tercetak dalam dokumen agama dan negara, institusionalisasi ini sudah berjalan. Salah satunya lewat tradisi lamaran yang muncul dalam narasi Nina, Agustina, dan Taufik. Tradisi ini—yang selanjutnya biasa diikuti oleh pertunangan—adalah semacam “tanda jadi” atau *down payment* (DP) sebelum “pelunasan” lewat pernikahan. Melalui tradisi ini, hubungan menjadi urusan dan janji antarkeluarga, bukan lagi antardua orang.

Maka, wajar bila bahkan sebelum pernikahan itu sendiri menjadi resmi,

sifat “ketelanjuran” yang hadir selama proses menuju pernikahan membuat pihak yang terlibat susah untuk mundur. Kisah Agustina menegaskan hal ini. Secara pribadi, ia sebenarnya belum siap menikah. Tetapi karena keluarga Jefri telanjur datang melamar, dan keluarganya sendiri menerima lamaran tersebut, “mau tak mau” Agustina pun terikat dalam perjanjian untuk menikah dengan Jefri.

Di dalam kisah Nina, ia terjepit antara cinta lama kepada mantan yang “tidak jelas” dan pacar baru, Bara, yang dapat memberi “kepastian”. Saat mantannya, Adit, menelepon semalam sebelum hari pernikahan, ia secara pribadi merasa bimbang. Namun, ia terikat oleh wacana moral dan tanggung jawab terhadap pihak yang lebih luas, “Tapi udahlah, tinggal besok. Aku harus menjaga komitmenku. Apa yang sudah aku katakan, aku harus tanggung jawab dengan itu.” Ucapan “tanggung jawab” yang dikemukakan oleh Nina menunjukkan bahwa ini sudah bukan lagi soal perasaan pribadinya, tapi soal tanggung jawab kepada keluarga Bara, juga kepada masyarakat luas yang menuntut ditepatinya janji.

Janji pernikahan—yang seakan-akan—adalah janji antara dua orang, sebenarnya merupakan janji dan komitmen kepada *stakeholder* yang lebih luas. Dan, tentu, seperti ditunjukkan oleh Nina, janji publik lebih susah diingkari daripada janji personal. Bila diingkari—bahkan sebelum ia menjadi resmi—ia akan membawa rasa malu. Di dalam masyarakat umum, batalnya pernikahan atau putusnya pertunangan adalah sesuatu yang sangat memalukan, tabu dibicarakan, absen dari pembahasan. Di tahapan selanjutnya, ketika pernikahan diresmikan secara sah lewat institusi hukum dan agama, janji publik ini menjadi ikatan hukum dan ilahi: janji pada negara, janji kepada Tuhan. Di tahap ini, ia menjadi lebih dan lebih susah lagi untuk “diingkari”. Di sini, kita dapat melihat sekali lagi, bagaimana institusionalisasi mencipta pernikahan sebagai niscaya, bahkan ketika ada keraguan atau kebimbangan. Institusionalisasi membawa “tekanan” agar pihak terlibat tetap lanjut sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Setelah legitimasi ilahi dan sosial bekerja dalam memproduksi tatanan kebenaran tentang hubungan berpasangan, strategi berikutnya yang bekerja adalah *normalisasi*. Di tahap ini, wacana mulai bergeser dari “keharusan” ke “kepantasan”. Normalisasi bekerja sebagai perantara antara institusi dan individu—ia memastikan bahwa apa yang diatur oleh sistem menjadi terasa wajar di tingkat pengalaman personal. Pernikahan menjadi sesuatu yang dilakukan karena demikianlah yang wajar, pantas, dan “normal”. Tidak dibutuhkan pen-

jelasan, justifikasi, atau legitimasi. Keniscayaan pernikahan dikukuhkan sebagai sesuatu yang *self-explanatory*.

Sifat *self-explanatory* ini dapat dilihat dari dua kutipan yang muncul dalam narasi Agustina. Jefri memutuskan untuk menikah meskipun ia sebenarnya kurang berminat karena saran seniorinya, “Kamu tetap harus menikah, karena di masa tuamu akan bagaimana kalau kamu tidak menikah?” Senada dengan ini, ibu Agustina memutuskan untuk menerima lamaran Jefri dengan alasan, “Kayaknya anak ini (ket: Agustina) udah mau nikah banget ... mau cari apa lagi?” Ujaran-ujaran seperti “... akan bagaimana kalau tidak menikah?” dan “... mau cari apa lagi?” mencerminkan bagaimana pernikahan digambarkan sebagai satu-satunya opsi dalam hidup.

Keempat narasumber merupakan generasi kelas menengah terdidik yang tumbuh pada era pasca-Reformasi, di mana pendidikan tinggi dan romantisme modern berkembang berdampingan dengan norma keluarga yang tetap konservatif. Dalam konteks ini, usia akhir 20-an hingga awal 30-an menjadi batas implisit kapan seseorang dianggap layak menikah. Kekhawatiran dianggap “terlalu lama pacaran”, “tidak serius”, atau “tidak laku” muncul terutama dalam pengalaman narasumber perempuan.

Selain dinormalisasi sebagai jenjang hidup, pernikahan juga dinormalisasi sebagai jenjang hubungan terakhir, di mana hubungan benar-benar menjadi sah. Pernikahan adalah ujung dari hubungan berpasangan yang umum dan normatif, yang biasanya dimulai dari perkenalan, pendekatan, pacaran, hingga pernikahan. Jenjang-jenjang ini memiliki level komitmen, tanggung jawab, hak, kewajiban, dan keintiman yang terus meningkat.

Di dalam narasi Taufik dan narasumber keempat, Otto, secara prinsipiel, mereka tidak menyatakan keyakinannya pada kebaikan, kebenaran, atau pentingnya pernikahan. Bahkan, Otto sebenarnya tidak percaya pada pernikahan. Namun, keputusan menikah tetap lahir sebab tingkat keintiman dan komitmen mereka dengan pasangan pada akhirnya hanya dapat diwadahi oleh institusi pernikahan. Bila hubungan mereka hanya berhenti di tahap pacaran, setidaknya di Indonesia, ini akan dianggap sebagai hubungan yang menggantung, tidak pasti, dan tidak sah, seperti dinyatakan Otto, “*Anyway*, aku nggak harus percaya pernikahan untuk menikah Dan untuk bisa membangun *partnership* ini, kalau di Indonesia, caranya harus menikah.” Dalam konteks ini, keniscayaan pernikahan lahir karena ia secara diskursif dan non-diskursif dikonsepisi sebagai satu-satunya *endgame* dari hubungan yang dapat diterima

oleh masyarakat. Secara sederhana, ketiga strategi di atas dapat dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Tiga strategi untuk membangun keniscayaan pernikahan.

Strategi	Arti	Fungsi	Bunyi
Transendentalisasi	Melampaui manusia.	Legitimasi ilahi.	Manusia tunduk pada Tuhan.
Institusionalisasi	Melampaui individu.	Legitimasi sosial-administratif.	Individu tunduk pada masyarakat.
Normalisasi	Penetapan kewajaran.	Konsensus mengenai yang wajar dan menyimpang.	Individu mengikuti akal sehat dan kewajaran.

Bila ditelaah dengan lebih mendetail, ketiga strategi ini melahirkan keniscayaan melalui pola serupa, yakni lewat de-individualisasi pengalaman yang membuat pernikahan menjadi impersonal. Pernikahan dijauhkan dari pengalaman yang secara material sebenarnya individual, spesifik, dan beragam. Akibatnya, individu kehilangan kepemilikan atas pengalamannya sendiri—ia hidup di bawah narasi yang lebih besar dari dirinya. Melalui ketiganya, pernikahan tidak lagi bicara tentang “aku dan kamu” tetapi justru mengenai hal-hal yang lebih besar, entah itu Tuhan, institusi, atau norma masyarakat.

Beberapa dampak material dari impersonalisasi ini terlihat dalam kisah para narasumber. Di dalam cerita Nina dan cerita Agustina mengenai Jefri misalnya, tampak bahwa hasrat untuk menikah sudah ada, bahkan sebelum orang mengetahui siapa pasangannya. Di dalam contoh-contoh ini, yang pertama-tama diinginkan adalah inisiasi ke dalam institusi pernikahan itu sendiri. Pasangan hanya datang untuk mengisi “lowongan” posisi yang dibuka.

Logika serupa muncul ketika Nina mempertimbangkan pernikahan keduanya. Ia mengatakan, “Misalnya aku menikah secara Katolik, nggak mungkinlah perpisahan itu akan terjadi lagi.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa keutuhan relasi dipahami bukan terutama bergantung pada dinamika personal pasangan, melainkan pada kekuatan institusinya. Dengan demikian, persoalan dalam pernikahan sebelumnya dibaca sebagai kegagalan format institusional, bukan semata persoalan relasional individual.

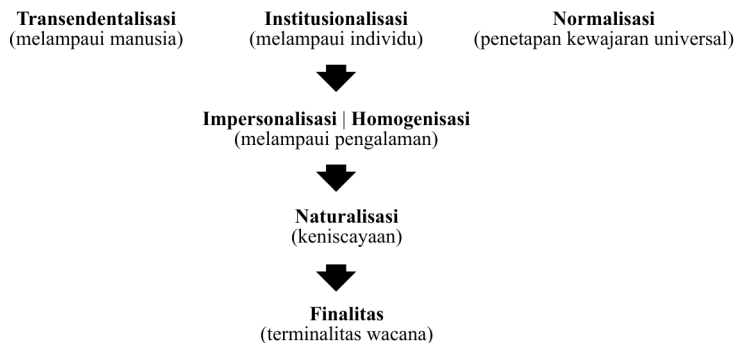
Sementara itu, di dalam kasus Otto, diperlakukannya pernikahan bukan saja sebagai impersonal tetapi homogen, membuatnya menyangkal pengalaman pribadinya sendiri. Sebelum menikah, ia sudah melihat banyak *red-*

flag pada Sofia, bahkan sudah mengalami berbagai bentuk kekerasan dalam hubungan. Tetapi, pengalaman personal ini ia tekan. Ia tetap percaya bahwa hubungan mereka akan baik-baik saja dan memutuskan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih jauh, “Soalnya aku nggak pernah berhubungan *long-term* juga, jadi aku nggak tahu harusnya *gimana*.” Pernyataan “harusnya *gimana*” mengandaikan adanya *template* universal untuk relasi jangka panjang, melahirkan ilusi keseragaman. Individu perlu belajar menyesuaikan diri—bukan dengan pasangan *per se*, tetapi dengan syarat institusinya. Impersonalitas dan homogenitas yang dilahirkan oleh ketiga strategi di atas melahirkan penerimaan ketika ada yang terasa janggal, sebab pengalaman unik digantikan oleh skenario tunggal.

Selain melahirkan impersonalisasi dan homogenisasi, kombinasi tiga strategi di atas juga menghasilkan satu efek struktural yang sangat penting: finalitas pernikahan. Finalitas ini bukan hanya menyangkut gagasan bahwa pernikahan adalah jenjang hidup yang “terakhir”, atau *endgame* dari hubungan, tetapi terutama merupakan cara kerja wacana yang menutup kemungkinan-kemungkinan lain. Akhir dari pernikahan adalah “sampai maut memisahkan”. Finalitas ini terbentuk karena ketiga strategi bekerja simultan: transendentalisasi mengikat pernikahan pada kehendak ilahi, institusionalisasi menempatkannya di dalam struktur hukum dan sosial yang rigid, dan normalisasi membuatnya tampak sebagai satu-satunya skenario yang masuk akal. Begitu pernikahan difinalisasi, segala dinamika relasional yang terjadi setelahnya harus ditafsirkan sebagai “konsekuensi” untuk dijalani, bukan sebagai sesuatu yang masih terbuka untuk dinegosiasi.

Finalitas ini tampak dalam kecenderungan para narasumber untuk mempertahankan pernikahan meskipun berada dalam kondisi yang menekan. Agustina, meskipun telah mengalami depresi, masih merasa “ini bisa disatukan”. Nina memilih “memaklumi” karena masih merasa sayang, sementara Taufik tetap bertahan meskipun mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena menganggap meninggalkan pasangan yang sedang “sakit” sebagai tindakan yang tidak bermoral: “Aku waktu itu malah nggak kepikiran untuk ninggalin dia, karena kalau misal istriku sakit kanker (ket: Taufik menganggap Sarah sakit jiwa), masa aku ceraikan?” Bahkan, Otto mencoba menyesuaikan diri dengan relasi gender yang sebenarnya bertentangan dengan keyakinannya demi mempertahankan pernikahan. Dengan demikian, ketiga strategi tersebut tidak hanya mendorong individu memasuki pernikahan, tetapi juga membentuk keharusan moral untuk mempertahankannya, bahkan ketika relasi tersebut telah menjadi destruktif. Dengan demikian, tampak bahwa ketiga strategi

tersebut bukan saja “menjebak” individu untuk masuk ke dalam pernikahan, tetapi selanjutnya juga bekerja dalam “memaksa” individu mempertahankan pernikahan, apapun kondisinya. Secara sederhana, mekanismenya dapat dirangkum dalam gambar 1 berikut.



Gambar 1. Mekanisme yang melahirkan keniscayaan pernikahan.

Terakhir, keniscayaan pernikahan sebagai kebenaran dikukuhkan lewat kontras dengan yang “salah”. Strategi pamungkas dalam penetapan keniscayaan pernikahan pun diberlakukan, yakni *prosedur eksklusi*, yang mencakup: (1) larangan (*prohibition*); (2) pembedaan antara subjek yang “waras” dan “gila”; dan (3) kehendak akan kebenaran (*will to truth*).³⁵ Objek yang utamanya dieksklusi dari wacana pernikahan ialah perceraian. Di sini, perceraian menjalankan fungsi sebagai negasi yang dibutuhkan: buruk, salah, dan berposisi dengan pernikahan.

Mekanisme pertama tampak dalam bentuk *silencing* terhadap perceraian. Nina mengatakan bahwa ia tidak pernah membayangkan kemungkinan berpisah setelah menikah karena “... tidak punya referensi tentang itu.” Pernyataan ini menunjukkan bagaimana perceraian absen dari imajinasi sosial akibat jaranginya ia dibicarakan secara terbuka. Dalam percakapan sehari-hari, perceraian cenderung diposisikan sebagai sesuatu yang tabu, memalukan, dan sebisa mungkin dihindari. Akibatnya, pernikahan menjadi skenario hidup yang normal dan diharapkan, sementara perceraian diperlakukan sebagai kemungkinan yang tidak seharusnya terjadi. Ini merupakan fungsi eksklusi pertama, yakni *larangan*.

Larangan ini membuka jalan bagi mekanisme eksklusi yang kedua: *pembedaan subjek*. Begitu perceraian muncul sebagai ucapan—apalagi sebagai

³⁵ Foucault, “Order of Discourse.”

pilihan—ia tidak lagi netral. Ia segera diposisikan dalam sistem klasifikasi moral yang membedakan antara subjek yang “baik” dan “buruk”, “waras” dan “gila”, “berhasil” dan “gagal”. Dengan kata lain, bila larangan membuat perceraian tak terpikirkan; pembedaan membuatnya tak termaafkan. Jika larangan menghasilkan *ketiadaan referensi*, maka pembedaan menghasilkan *penilaian*. Di sinilah perceraian tidak sekadar tidak dibicarakan, tetapi secara aktif ditempatkan sebagai deviasi: sesuatu yang menempel bukan hanya pada relasi, tetapi pada pribadi yang mengalaminya.

Hal ini tampak dalam narasi Agustina yang mengatakan bahwa “di keluargaku belum pernah ada yang cerai,” seolah perceraian berada di luar identitas moral keluarganya. Bahkan, ide perceraian pernah disebut “gila” oleh suaminya, menunjukkan bagaimana perceraian ditempatkan sebagai pilihan yang ekstrem dan tidak wajar. Nina juga mengakui bahwa status janda membawa rasa malu akibat stigma sosial yang melekat padanya. Dalam konteks ini, subjek yang menikah diasosiasikan dengan moralitas dan stabilitas, sementara subjek yang bercerai diposisikan sebagai deviasi.

Mekanisme ketiga bekerja melalui kehendak akan kebenaran (*will to truth*), yakni tuntutan agar perceraian selalu disertai pembenaran. Dari gambaran umum cara para narasumber menceritakan pengalaman mereka, tampak kecenderungan untuk *overjustifying* keputusan bercerai—menegaskan bahwa mereka sudah mencoba bertahan, berkompromi, dan menahan diri sebelum akhirnya menyerah. Perceraian harus dilegitimasi melalui alasan-alasan yang dianggap cukup serius, seperti kekerasan, perselingkuhan, atau kondisi psikologis yang sudah tidak tertahankan. Karena itu, perceraian tampil sebagai *last resort*, bukan pilihan biasa. Agustina, Taufik, dan Otto, misalnya, menggambarkan kondisi rumah tangga yang sudah sangat menekan sebelum akhirnya memutuskan berpisah. Bahkan dalam kasus Agustina, seorang rama (pastor Katolik) sekaligus psikolog mengatakan, “Sebagai rama, aku harus bilang kalau ini bisa dipertahankan. Tapi sebagai psikolog, memang aku harus akui bahwa ini sudah nggak bisa.” Pernyataan ini menunjukkan bagaimana perceraian tetap harus dinegosiasikan terhadap tuntutan moral untuk mempertahankan pernikahan.

Dengan demikian, tampak bagaimana prosedur eksklusi menjadi strategi pamungkas yang mengunci dan mengukuhkan keniscayaan dan kebenaran pernikahan. Perceraian bukan dibungkam atau distigma karena ia secara hakiki buruk, tetapi demi membuat pernikahan tampak semakin benar. Dengan menempatkan perceraian sebagai sesuatu yang tabu, menyimpang, memalukan

kan, atau hanya dapat dibenarkan lewat penderitaan ekstrem, wacana mem-pertebal aura keniscayaan yang melekat pada pernikahan. Yang salah dibutuhkan agar yang benar makin tak terbantahkan. Perceraian dijadikan antitesis dari tesis bahwa pernikahan adalah jalan satu-satunya yang sah, wajar, dan bermoral.

Kesimpulan

Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa “takdir” dan sifat teleologis pernikahan sama sekali bukan sesuatu yang alamiah atau *given*, melainkan hasil kerja rangkaian strategi dan mekanisme kuasa. Transendentalisasi menautkannya pada kehendak ilahi; institusionalisasi menjeratnya dalam hukum, keluarga, dan birokrasi; normalisasi menetakannya sebagai satu-satunya jalan hidup yang wajar. Ketiganya secara bersama melucuti pengalaman individual—mengubahnya menjadi impersonal dan homogen—sehingga pernikahan tampak seperti hukum alam. Dari sini lahirlah naturalisasi dan finalitas: pernikahan menjadi *endgame* hidup untuk diterima dan dijalani. Dan untuk memastikan tatanan ini tak tergoyahkan, prosedur eksklusi berfungsi mengunci kebenarannya: perceraian dibungkam, distigma, dan hanya diizinkan sebagai pilihan paling akhir. Dengan demikian, apa yang tampak sebagai “takdir” sesungguhnya adalah efek kumulatif dari operasi wacana yang mengonstruksi pernikahan sebagai satu-satunya kebenaran.

Pernyataan Penulis

Benturan Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan terkait penelitian, kepenulisan, dan/atau publikasi artikel ini.

Pernyataan Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima hibah khusus dari lembaga pendanaan mana pun di sektor publik, komersial, atau nirlaba.

Pernyataan Etika Penelitian

Penelitian ini tidak melalui kaji etik kelembagaan formal (*institutional review board*), karena tinjauan tersebut belum menjadi prosedur baku bagi penelitian humaniora dan ilmu sosial di institusi penulis. Meskipun demikian, penelitian dilaksanakan dengan mematuhi standar etik disiplin yang berlaku. Seluruh informan berpartisipasi secara sukarela dan memberikan persetujuan

berdasarkan informasi (*informed consent*) setelah memperoleh penjelasan mengenai tujuan penelitian, prosedur perekaman, penggunaan data, serta hak mereka untuk menolak menjawab pertanyaan tertentu, atau mengundurkan diri kapan saja tanpa konsekuensi. Mengingat sifat topik yang personal dan sensitif (pengalaman pernikahan dan perceraian), wawancara dilakukan dengan memperhatikan kenyamanan serta kerentanan emosional informan, dan peneliti tidak mendesak pengungkapan yang tidak ingin dibagikan. Untuk menjamin kerahasiaan, identitas seluruh informan dianonimkan dalam penyajian data. Rekaman dan transkrip disimpan secara aman serta digunakan semata-mata untuk kepentingan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Bachen, Christine, dan Eva Illouz. "Imagining Romance: Young People's Cultural Models of Romance and Love." *Critical Studies in Mass Communication* 13, no. 4 (1996): 279–308. <https://doi.org/10.1080/15295039609366983>.
- Bennett, Linda Rae. *Women, Islam and Modernity: Single Women, Sexuality and Reproductive Health in Contemporary Indonesia*. London: Routledge, 2005.
- Bhargava, Swarnima. "Working with Young Women Facing Pressure to Marry." *International Journal of Narrative Therapy & Community Work*, no. 2 (2022): 38–46.
- Brechet, Claire. "Representation of Romantic Love in Children's Drawings: Age and Gender Differences." *Social Development* 24, no. 3 (2015). <https://doi.org/10.1111/sode.12113>.
- Brett, Rose Alison Anna. "Views of Traditions and Gender Roles in Heterosexual Relationships." PhD Thesis, University of Surrey, 2023.
- Bukhari, Nayab, dan Mehwish Riaz. "Social-Cultural Stigmas and Encounters Faced by 'Still Unmarried' Women and Their Families." *Journal of World Research* 3, no. 2 (2023): 1–8. <https://jwr.bwo-researches.com/index.php/jwr/article/view/44>.
- Canesares, Cutie Bacubas, Ivana Jae Bitangcol, Kyne Castaneda, Danielle Kate Fontamillas, dan Danielle Rich Quilas. "Through the Lens of Solitude: Capturing the Realities of Singlehood Stigma Among Women." *11th International Scholars Conference* 11, no. 2 (2024): 567–78. <https://jurnal.unai.edu/isc/article/view/3493>.
- Carabine, Jean. "Unmarried Motherhood 1830–1990: A Genealogical Analysis." Dalam *Discourse as Data: A Guide for Analysis*, 267–309. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2001.
- Carreiro, Jaquoya. "Gender Role Beliefs, Household Chores, and Modern Marriages." PhD Thesis, Antioch University, 2021.

- Chatterjee, Sanhita. "Conflicting Ideals and Practices: Gender, Marriage and Norms within the Urban Middle Classes in Contemporary India." PhD Thesis, University of Essex, 2022.
- Coltrane, Scott, dan Michele Adams. "The Social Construction of the Divorce 'Problem': Morality, Child Victims, and the Politics of Gender." *Family Relations* 52, no. 4 (2003): 363–72. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2003.00363.x>.
- Fatima, Ifrah, dan Rukhsar Anwar. "From Discourse to Marriage: A Comparative Critical Discourse Analysis of Pakistani Matrimonial Profiles." *International Premier Journal of Languages & Literature* 3, no. 3 (2025): 614–39.
- Fisher, Helen E. *Anatomy of Love: The Natural History of Monogamy, Adultery, and Divorce*. New York: Simon & Schuster, 1993.
- Foucault, Michel. *Discipline and Punish*. New York: Pantheon Books, 1977.
- . "Power and Strategies." Dalam *Michel Foucault: Power, Truth, Strategy*, disunting oleh Meaghan Morris dan Paul Patton, 48–58. Sydney: Feral Publications, 1979.
- . *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977*. Disunting oleh Colin Gordon. New York: Pantheon Books, 1980.
- . *The Archaeology of Knowledge*. New York: Pantheon Books, 1972.
- . *The History of Sexuality*. New York: Pantheon Books, 1978.
- . "The Order of Discourse." *Social Science Information* 10, no. 2 (1971): 7–30. <https://doi.org/10.1177/053901847101000201>.
- Gaetano, Arianne M. "Social Mobility and Single Women's Marriage Dilemma in Urban China." *American Behavioral Scientist* 70, no. 6 (2026): 764–79.
- Gibbs, Graham R. "Discourse Analysis Part 2: Foucauldian Approaches." YouTube Video, 2015. https://www.youtube.com/watch?v=E_ffCsQx2Cg.
- Gui, Tianhan. "Coping with Parental Pressure to Get Married: Perspectives from Chinese 'Leftover Women.'" *Journal of Family Issues* 44, no. 8 (2023): 2118–37.
- Himawan, Karel K. "Either I Do or I Must: An Exploration of the Marriage Attitudes of Indonesian Singles." *The Social Science Journal*, advance online publication, 2018. <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2018.07.007>.
- Himawan, Karel K., Matthew Bambling, dan Sisira Edirippulige. "What Does It Mean to Be Single in Indonesia? Religiosity, Social Stigma, and Marital Status Among Never-Married Indonesian Adults." *SAGE Open* 8, no. 3 (2018). <https://doi.org/10.1177/2158244018803132>.
- Khan, Shah Nawaz, Sahibzada Wasim Iqbal, dan Muhammad Imran. "Commodification of Women in Pakistani Newspaper Matrimonial Advertisements: A Critical Discourse Analysis of Jang and Dawn Newspaper Classifieds." *ASSAJ* 4, no. 02 (2025): 1225–34.
- Krishnan KT, Athira, dan Atiq Ahmed. "'Marriage Should Not Mean Losing Myself': Changing Expectations and Relationship Concerns among

- Unmarried Young Adults in Kerala.” *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 2025, 1–18.
- Lamba, Tanya. “At the Crossroads of Marriage: Experiences of Young Urban Middle-Class Women Negotiating Family and Sexuality Within Heterosexual Intimate Relationships in North India.” *Changing Societies & Personalities* 6, no. 4 (2022): 965–79.
- Lawes, Rachel. “Marriage: An Analysis of Discourse.” *British Journal of Social Psychology* 38, no. 1 (1999): 1–20. <https://doi.org/10.1348/014466699164004>.
- Liong, Mario. “Re-Negotiating Fatherhood: Divorced Fathers in Hong Kong Experiencing and Resisting Stigma.” *Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific*, no. 39 (2016).
- McCabe, Maria. “Heteronormativity: The Bias Underlying Marriage, Gender Roles, Sex Discrimination, and Custody Determinations.” *U. Tol. L. Rev* 53 (2021): 127.
- Mills, Sara. *Discourse*. London: Routledge, 1997.
- Richter, Julia, dan Christine Finn. “Transactions Between Self-Esteem and Perceived Conflict in Romantic Relationships: A 5-Year Longitudinal Study.” *PloS One* 16, no. 4 (2021): e0248620.
- Saukko, Paula. *Doing Research in Cultural Studies: An Introduction to Classical and New Methodological Approaches*. London: SAGE Publications, 2003.
- . *The Anorexic Self: A Personal, Political Analysis of a Diagnostic Discourse*. Albany: State University of New York Press, 2008.
- Singh, Shakila. “Women Want Love, Men Want Wives: The Discourse of Romantic Love in Young Adults’ Future Marriage Goals.” *Agenda: Empowering Women for Gender Equity* 27, no. 2 (2013): 22–29. <https://doi.org/10.1080/10130950.2013.808798>.
- Trask, Bahira. “Love in a Time of Globalization: Intimacy Re-Imagined Across Cultural Flows.” Dalam *International Handbook of Love: Transcultural and Transdisciplinary Perspectives*, 1–17. Cham: Springer Nature Switzerland, 2025.
- Underwood, Carrie R., dan Rachael D. Robnett. “Benevolent Sexism, Attachment Style, and Contingent Self-Esteem Help to Explain How People Anticipate Responding to a Troubled Romantic Relationship.” *Journal of Applied Social Psychology* 55, no. 12 (2025): 1063–78.
- Voigt, Eric P. “Reconsidering the Mythical Advantages of Cohabitation: Why Marriage Is More Efficient Than Cohabitation.” *Indiana Law Journal* 78 (2003): 3.